

ANALISIS SPILL OIL TERHADAP VOLUME DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN DI LAUT PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018

Diki Budiman¹, Nia Fitria²

¹Program Studi Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Karimun, Provinsi Kepri, Indonesia

²Program Studi Bisnis Administrasi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, China

¹budiman.diky@gmail.com; ²niafytria@ymail.com

Abstract

The sea has high economic value resources, and yet it is not free from various problems. Spilled oil is one of the many contradictions caused by humans. This study aims to analyze oil spills on the volume and value of fisheries production in the Riau Islands by using a qualitative method using descriptive. Based on the results of the study, the amount of volume and value of fish production in the Riau Islands is still relatively low. If sea problems are added, such as oil spills, it will worsen not only produce marine ecosystems, but also other production chains.

Keywords: spill oil, volume and product value, fisheries.

Abstrak

Laut memiliki sumber daya dengan nilai ekonomis yang tinggi, akan tetapi tidak lepas dari berbagai permasalahan. *Spill oil* ialah satu dari sekian permasalahan yang disebabkan oleh manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *spill oil* terhadap volume dan nilai produksi perikanan di laut Kepulauan Riau dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan jumlah volume dan nilai produksi perikanan di laut Kepri masih tergolong rendah, jika ditambah permasalahan laut, seperti *spill oil* maka akan memperburuk tidak hanya hasil ekosistem laut, namun juga rantai perekonomian lainnya.

Kata kunci: *Spill Oil*, Volume dan Nilai Produksi, Perikanan.

1. PENDAHULUAN

Kepulauan riau merupakan Provinsi dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia dengan jumlah pulau 2.408, dengan luas daratan 8.201.72 km² dan luas perairan 69.155.01km² (BPS, 2017). Letak geografis Provinsi Kepulauan Riau tertinjau dari ujung selat Malaka hingga laut Natuna. Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Hal ini menjadikan Kepulauan Riau sebagai sentral perdagangan sehingga menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran penting dalam keluar masuknya perdagangan dunia. Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2 (dua) kota dan 5 (lima) kabupaten meliputi Kota Tanjung Pinang (ibu kota provinsi), Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Bintan, Kabupaten Anambas dan Kabupaten Lingga.

Perairan Indonesia diketahui memiliki perairan yang sangat strategis sebagai jalur masuknya kapal barang yang dibawa dari lautan Timur Tengah, Eropa dan Asia Selatan (Pardosi, 2016). Dewasa ini, masalah laut sudah menjadi fokus dari beberapa negara, tidak hanya pemanfaatan hasil laut baik eksplorasi maupun eksploitasinya tetapi juga berfokus hingga ke penjagaan wilayah laut. Penjagaan wilayah laut ini dilakukan agar hasil laut yang dimiliki tetap memiliki keberlanjutan di masa yang akan datang. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang luas, juga memiliki fokus dalam penjagaan wilayah lautnya. Penjagaan yang cukup ketat dilakukan berkaitan dengan kapal- kapal yang masih melakukan tindakan yang merugikan. Salah satu

tindakan merugikan yang masih sering terjadi dilaut Indonesia adalah spill oil yang merusak tidak hanya air lautnya tetapi juga hasil sumber daya laut.

Permasalahan spill oil tidak hanya menjadi fokus Indonesia, namun juga menjadi perhatian dunia internasional. *International Maritime Organization* (IMO) merupakan konvensi dunia yang berfokus pada pencemaran bagi lingkungan laut oleh kapal juga telah mengeluarkan peraturan khusus, salah satunya adalah *The International Convention for the Prevention of Pollution from Ship atau yang dikenal dengan marine pollution* (MARPOL). Pemberlakuan konvensi tersebut merupakan salah satu bukti nyata dari pemerintah dunia dalam menyikap masalah pencemaran lingkungan laut

Pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh *spill oil* di perairan laut Indonesia, sudah beberapa kali terjadi. Perairan laut Kepulauan Riau merupakan salah satu perairan yang tidak lepas dari pencemaran *spill oil*. Pada bulan November tahun 2019 perairan laut Kepulauan Riau tercemar oleh *spill oil* lebih tepatnya lokasi terdampak ada di sekitar perairan laut Belakang Padang, sedangkan untuk sumber atau pelaku pencemaran masih belum diketahui (Mediacenter, 2019).

Spill oil atau tumpahan minyak tentunya akan merusak tidak hanya air laut, tetapi juga sumber daya laut yang ada di dalamnya. Ekosistem laut yang rusak tidak hanya berpengaruh pada ekosistem lautnya tetapi juga akan mempengaruhi ekosistem lainnya, seperti rantai makan burung yang biasa memakan ikan-ikan yang biasa muncul ke permukaan air laut. Selain merusak ekosistem alami, *spill oil* juga akan mempengaruhi hasil daya tangkap ikan oleh nelayan. Oleh sebab itu, pada penelitian ini peneliti akan melakukan analisis terkait *spill oil* terhadap nilai ekonomis sumber daya alam yang akan diukur dengan melihat hasil dari volume dan nilai produksi perikanan di laut Kepulauan Riau tahun 2018.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Spill Oil*

Kajian teori dibutuhkan dalam suatu penelitian, agar penelitian yang dilakukan tetap berada pada koridor atau jalur yang sesuai. Pada penelitian ini, ada beberapa teori yang digunakan berkaitan dengan pencemaran laut. Pencemaran laut diartikan sebagai suatu peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian dan perumahan, kebisingan, atau penyebaran organisme invasif (asing) ke dalam laut, yang berpotensi memberi efek berbahaya (Latief, 2018). Berdasarkan berbagai masalah pencemaran laut yang disebutkan, masalah *spill oil* merupakan salah satu masalah yang cukup rumit. Hal ini disebabkan, karena *spill oil* atau limbah minyak bisa langsung terserap hingga ke bagian partikel terkecil dilaut.

Tumpahan minyak dapat terjadi dimana saja dan diwaktu yang tidak dapat diprediksi terkhusus daerah yang berdekatan dengan aktivitas pengeboran minyak dan jalur lalu lintas kapal. Yang menyebabkan kerusakan baik pada ekosistem darat, udara dan laut (Ramadhan, 2017). Tanah dapat terkontaminasi oleh minyak melalui tumpahan ataupun minyak yang tersimpan dalam tanah tersebut (Helmy, 2015). Kerusakan minyak akibat minyak dalam tanah mempengaruhi pencemaran ekosistem. Kandungan mineral dengan intensitas kecil berdampak pada diseminasi minyak pada tanah (HK, 2015). Dampak nya adalah berkurangnya ekosistem yang menyebabkan organisme berkurang dalam menyuburkan tanah. Menurut (Latief, 2018), limbah minyak merupakan buangan yang berasal dari hasil eksplorasi produksi minyak, pemeliharaan fasilitas produksi, fasilitas penyimpanan, pemrosesan dan tangki penyimpanan minyak pada kapal laut.

International Maritime Organization atau yang dikenal dengan IMO, telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait limbah minyak. Aturan IMO yang mengatur limbah minyak ini diatur di dalam MARPOL. MARPOL (Marine Pollution) adalah sebuah peraturan internasional yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran di laut (Latief, 2018). Struktur aturan MARPOL terdiri dari enam lampiran teknis, diantaranya yaitu; (annex I-VI): Annex I: pencegahan polusi oleh minyak, berlaku 2 Oktober 1983. Annex II: pencegahan polusi zat

cair berbahaya (Noxious Substances) dalam bentuk curah, berlaku 2 Oktober 1983. Annex III: pencegahan polusi dari zat berbahaya (Harmful Substances) dalam bentuk kemasan, berlaku mulai 1 Juli 1999. Annex IV: pencegahan polusi dari air kotor/ limbah (Sewage) dari kapal, berlaku mulai 27 September 2003. Annex V: pencegahan polusi oleh sampah (Garbage), berlaku mulai 31 Desember 1988. Annex VI: pencegahan polusi udara akibat gas buang mesin kapal, berlaku mulai 19 Mei 2005 (“MARPOL, Komitmen Industri Pelayaran Melindungi Laut, Darat, Udara,” 2019).

2.2 Volume dan nilai produksi perikanan

Volume dan nilai produksi perikanan merupakan salah satu dari sekian banyak alat ukur yang ada guna melihat atau menilai hasil sumber daya laut. Adapun volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/ budidaya. Pada penelitian ini, peneliti hanya fokus pada ikan hasil tangkapan di laut. Nilai produksi, memiliki definisi nilai pada waktu hasil penangkapan/ budidaya di daratkan. Berdasarkan definisi tersebut, maka harga yang digunakan adalah harga produsen (BPS, 2017).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu langkah ataupun cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam rangka memperoleh data yang akan dianalisis dalam mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dapat juga diartikan sebagai cara agar data dapat diperoleh dan dianalisis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan kemudian di analisis dengan teknik analisis (*analysis technic*). Langkah sistematis atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan melalui literatur yang sudah ada, seperti jurnal maupun artikel terdahulu yang sudah terublikasi baik dalam bentuk P-ISSN maupun E-ISSN, peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga dilakukan telaah

melalui buku-buku atau bahan yang terkait dengan *spill oil*. Penggunaan pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk mempelajari suatu fenomena secara mendalam.

Menurut (Wahyuni, 2015), pendekatan kualitatif adalah cara berfikir secara umum dalam melaksanakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif menggambarkan secara eksplisit atau implisit, tujuan dari penelitian kualitatif, peranan dari penelitian, tingkat penelitian, dan metode dari analisis data. Setidaknya ada tujuh jenis dari pendekatan kualitatif, diantaranya etnografi, fenomena, penelitian lapangan, teori dasar, studi kasus, penelitian sejarah dan interpretasi. Fungsi utama dari pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dinominalkan.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang lebih relevan jika dibandingkan dengan pendekatan lainnya dalam menjelaskan fenomena yang terjadi pada permasalahan *spill oil* di Indonesia. Permasalahan *spill oil* di Indonesia merupakan hal yang cukup kompleks. Sehingga alat yang digunakan untuk menganalisis fenomena tersebut harus mampu menangkap dinamika tersebut. Penelitian ini, dianalisis dengan menggunakan metode studi pustaka (*lybrary research*).

Secara umum, tahapan pelaksanaan penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data inferior (sekunder) dan melakukan studi lebih dalam pada literatur. Dilanjutkan dengan penyusunan model dan analisis terkait data. Penyusunan rekomendasi dilakukan agar dapat mengurangi berbagai dampak yang dihasilkan dari tumpahan minyak di laut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi sumber daya laut di Indonesia sebagai Negara kepulauan cukup besar, terlebih pada hasil sumber daya lautnya. Menurut (Lasabuda, 2013), potensi budidaya laut, diantaranya; potensi budidaya ikan, udang, moluska dan rumput laut dengan luas potensi budidaya yakni sebesar 2 juta ha (20% dari total potensi lahan perairan pesisir dan laut berjarak 5 Km dari garis pantai) dengan volume 46,73 juta ton per tahun. Hal ini membutuhkan bahwa

potensi perairan laut Indonesia sangatlah besar, khususnya pada bidang perikanan. Besarnya potensi yang ada, tidak terlepas dari permasalahan yang timbul didalamnya, salah satu masalah di perairan laut Indonesia adalah permasalahan *spill oil* dan berbagai masalah lainnya.

Berbagai faktor yang bisa dijadikan sebagai acuan penilaian atas dampak yang dihasilkan dari *spill oil* adalah hasil sumber daya laut pada wilayah terdampak. Wilayah terdampak yang dijadikan batasan penelitian oleh peneliti adalah wilayah perairan laut Kepulauan Riau. Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan wilayah laut yang sangat luas, bisa dijadikan alternatif contoh bagi wilayah laut lainnya di Indonesia. Pemilihan ini dilakukan dengan alasan, sebagian besar masyarakat wilayah Kepri sudah melakukan pengelolaan hasil potensi sumber daya laut baik secara profesional maupun tradisional.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data kualitas hasil sumber daya laut dari beberapa aspek yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2018. Beberapa aspek hasil sumber daya laut tersebut diantaranya adalah;

a) Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Provinsi tahun 2017;

- b) Volume Produksi 10 Komoditas Utama di Laut Menurut Provinsi tahun 2017;
- c) Nilai Produksi Perikanan 10 Komoditas Utama Perikanan Tangkap di Laut Menurut Provinsi tahun 2017;
- d) Volume Produksi Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro Kecil Menurut Provinsi tahun 2017 VS Volume Produksi Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah Besar Menurut Provinsi tahun 2017.

Berdasarkan ke empat aspek tersebut peneliti mencoba melihat kualitas sumber daya hasil laut di wilayah terdampak atas pencemaran *spill oil*. Kualitas sumber daya laut bisa dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah berdasarkan volume dan nilai produksi perikanan tangkap di laut. Besar atau kecilnya volume dan nilai produksi bisa menjadi indikator baru dalam melihat potensi sumber daya laut atau perikanan di Indonesia.

A. Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut Provinsi tahun 2017

No.	Provinsi	Volume (Kg)	Nilai (RP 1.000,-)
1	Aceh	236.061.063	7.296.405.913
2	Bali	111.590.874	4.326.942.865
3	Banten	108.702.766	3.199.294.347
4	Bengkulu	65.754.741	2.145.828.018
5	DI Yogyakarta	5.315.183	298.769.617
6	Dki Jakarta	135.619.439	3.715.781.712
7	Gorontalo	134.889.408	3.047.677.665
8	Jambi	44.409.523	1.753.378.893
9	Jawa Barat	231.153.004	9.684.249.534
10	Jawa Tengah	253.614.002	8.187.199.607
11	Jawa Timur	551.925.217	13.086.882.953
12	Kalimantan Barat	128.207.868	3.726.583.275
13	Kalimantan Selatan	188.700.470	3.731.374.234
14	Kalimantan Tengah	67.384.375	1.398.344.092
15	Kalimantan Timur	41.040.829	1.409.470.131
16	Kalimantan Utara	12.618.992	710.102.594
17	Kepulauan Bangka Belitung	217.912.235	5.568.292.575
18	Kepulauan Riau	112.432.610	2.831.345.810
19	Lampung	172.276.754	5.587.514.341
20	Maluku	602.952.793	13.267.281.901
21	Maluku Utara	96.528.287	3.468.792.284
22	Nusa Tenggara Barat	179.140.092	3.312.624.543
23	Nusa Tenggara Timur	72.226.093	1.840.354.297
24	Papua	175.211.042	5.772.625.021
25	Papua Barat	421.840.393	10.392.584.583
26	Riau	107.843.145	4.487.148.536
27	Sulawesi Barat	56.100.283	1.531.583.906
28	Sulawesi Selatan	332.770.086	9.517.439.011
29	Sulawesi Tengah	177.517.180	3.756.939.811
30	Sulawesi Tenggara	229.328.079	5.564.777.553
31	Sulawesi Utara	393.448.120	12.402.856.099
32	Sumatera Barat	214.144.005	6.623.112.946
33	Sumatera Selatan	9.529.567	196.524.446
34	Sumatera Utara	715.442.065	20.780.174.400
Nasional		6.603.630.583	184.620.257.512
Sumber: Satu Data Kelautan dan Perikanan, 2018			

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa volume dan nilai produksi perikanan tangkap laut pada Provinsi Kepri baik dari segi volume (Kg) maupun nilai (Rp.1.000,-) masih tergolong rendah yaitu volume sebesar 112.432.610 dan nilai sebesar 2.831.345.810, bahkan lebih rendah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang luas lautnya lebih kecil jika dibandingkan dengan Provinsi Kepri.

B. Volume Produksi 10 Komoditas Utama di Laut Menurut Provinsi tahun 2017

No	Provinsi	Cakalang	Kakap	Kembung	Layang	Rajungan	Tenggiri	Teri	Tongkol	Tuna	Udang
1	Aceh	19.071.602	43.144.938	14.719.102	9.845.332	0	5.152.905	4.649.881	34.722.190	5.994.068	18.878.524
2	Bali	6.555.272	3.518.130	1.243.528	5.802.916	0	2.271.207	0	15.709.669	15.512.138	3.713.562
3	Banten	273.563	826.033	55.796.147	552.788	10.681.115	1.814.599	1.826.010	3.327.148	351.183	9.454.732
4	Bengkulu	252.954	2.154.241	320.386	140.580	696.383	4.681.907	10.682.417	6.089.187	327.862	1.838.120
5	DI Yogyakarta	1.371.530	43.497	4.427	103.688	0	55.503	0	389.591	433.113	851
6	DKI Jakarta	29.186.883	1.140.868	3.368.025	6.925.637	0	1.072.648	982.063	13.583.505	27.983.268	201.744
7	Gorontalo	51.391.484	3.599.283	14.221.055	4.228.716	76	510.913	1.304.519	8.949.560	23.543.460	145.398
8	Jambi	0	1.496.078	99	0	166.148	2.081.500	94.000	5.400	0	18.673.121
9	Jawa Barat	876.043	4.535.784	13.054.927	2.214.089	111.909.163	4.223.764	591.318	17.789.046	2.560.009	5.978.082
10	Jawa Tengah	931.909	7.461.533	6.661.753	10.362.183	23.458.851	10.095.180	4.926.991	18.770.367	1.756.508	18.389.977
11	Jawa Timur	10.664.967	14.680.463	14.976.345	31.100.181	35.450.371	3.271.966	29.268.428	62.414.528	2.366.398	31.491.932
12	Kalimantan Barat	0	1.269.776	22.615.725	2.385.782	62.026	7.398.000	2.618.831	11.611.360	0	37.749.851
13	Kalimantan Selatan	0	22.091.511	23.006.763	2.750.380	2.628.926	49.034.766	1.138	3.535.755	4.106	49.577
14	Kalimantan Tengah	0	5.888.650	3.401.620	0	1.798.360	6.062.834	0	431.702	0	14.716.837
15	Kalimantan Timur	7.132.361	4.752.480	1.421.948	1.770.772	558.924	274.701	169.019	1.920.867	3.967.471	10.279.081
16	Kalimantan Utara	109.129	3.081.670	0	14.282	0	1.758.188	0	21	0	1.198.776
17	Kepulauan Bangka Belitung	11.374.458	21.447.671	14.105.284	4.278	6.427.311	8.063.273	2.233.049	45.062.778	0	3.441.646
18	Kepulauan Riau	99.734	3.909.749	528.436	1.250.465	1.203.606	8.242.381	532.078	50.675.419	0	18.516.820
19	Lampung	0	22.930.526	4.117.477	21.262	34.305	2.255.865	2.719.321	14.085.086	4.397.685	5.065.868
20	Maluku	76.789.807	1.028.382	40.660.940	80.945.779	8.439.627	120.764.606	44.757.163	28.632.528	66.064.923	10.028.485
21	Maluku Utara	25.589.859	13.818.820	549.625	5.335.972	0	21.908	962.111	6.133.286	24.559.740	0
22	Nusa Tenggara Barat	7.995.773	4.324.825	10.649.069	7.693.005	2.905.272	1.240.503	5.557.494	10.481.976	2.255.589	2.078.859
23	Nusa Tenggara Timur	10.041.771	13.490.331	3.603.275	7.830.647	963.829	2.276.511	110.171	7.528.063	3.306.384	528
24	Papua	44.462.713	16.434.151	599.270	63.573	117.831	9.555.683	100.083	34.708.577	51.709.195	1.679.812
25	Papua Barat	16.203.585	89.902.289	35.019.642	8.694.670	0	19.939.316	15.875.079	524.717	11.494.385	8.825.129
26	Riau	0	14.458.160	0	0	20.388	3.421.658	3.699.425	11.944	0	9.633.224
27	Sulawesi Barat	12.093.453	12.522.568	138.680	251.079	0	0	1.968	592.794	1.478.017	0
28	Sulawesi Selatan	132.612	28.664.807	21.686.180	17.719.939	37.351.829	2.370.348	38.034.211	32.162	6.044.918	23.065.805
29	Sulawesi Tengah	50.481.066	15.314.234	12.903.965	20.870.915	0	247.309	2.984.320	937.473	10.371.450	91.430
30	Sulawesi Tenggara	23.814.810	17.261.194	16.468.079	44.115.694	7.185.514	1.457	17.537.722	10.727.043	6.297.794	1.225.540
31	Sulawesi Utara	46.419.709	99.218.331	19.425.848	23.967.714	0	2.789.722	8.952.248	4.133.300	12.762.507	2.024.557
32	Sumatera Barat	302.551	2.845.230	27.953.065	983.966	0	4.530.284	2.250.388	41.308.276	5.375.707	21.429.973
33	Sumatera Selatan	0	110.427	684.223	0	857.661	0	190.591	0	0	1.069.706
34	Sumatera Utara	13.928.286	21.707.730	81.254.071	27.615.429	19.504.956	15.209.354	89.044.892	16.183.597	2.315.285	119.135.267
Nasional		467.547.884	519.074.364	465.158.980	325.561.711	272.422.473	300.690.761	292.656.929	471.008.917	293.233.165	400.072.816
Sumber: Satu Data Kelautan dan Perikanan, 2018											

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa volume produksi 10 komoditas utama di laut menunjukkan hasil sumber daya laut terbesar untuk provinsi kepri adalah pada komoditas ikan tongkol dan terkecil adalah ikan tuna. Komoditas ikan tongkola berjumlah 50.675.419 sedangkan untuk komoditas ikan tuna berjumlah 0 (nol) atau tidak ada. Hal ini akan semakin buruk jika *spill oil* merebak pada wilayah laut Kepri.

C. Nilai Produksi Perikanan 10 Komoditas Utama Perikanan Tangkap di Laut Menurut Provinsi tahun 2017

No	Provinsi	Cakalang	Kakap	Kembung	Layang	Rajungan	Tenggiri	Teri	Tongkol	Tuna	Udang
1	Aceh	398.875.669	1.973.407.178	261.397.443	170.846.778	0	178.543.244	72.425.164	719.528.887	263.956.762	1.097.952.045
2	Bali	121.581.960	117.270.995	25.183.660	100.410.534	0	139.517.029	0	292.740.949	594.950.297	1.068.422.692
3	Banten	4.650.563	28.914.723	1.429.336.896	13.994.716	454.491.372	81.855.276	36.147.734	43.050.022	10.535.497	414.040.146
4	Bengkulu	7.588.612	78.484.088	7.504.032	2.551.153	17.409.582	168.822.993	71.832.650	167.972.679	10.340.271	104.445.810
5	DI Yogyakarta	29.455.589	1.398.131	110.682	2.263.858	0	1.387.580	0	5.609.476	13.588.935	56.751
6	DKI Jakarta	541.335.065	28.521.701	50.520.382	119.837.500	0	36.776.503	18.444.939	271.670.094	1.073.266.209	13.449.281
7	Gorontalo	896.593.674	82.041.847	225.277.261	47.036.079	3.828	33.209.348	17.520.800	142.918.620	983.805.769	7.269.897
8	Jambi	0	49.159.042	1.999	0	8.315.515	79.424.988	1.765.492	93.956	0	1.215.148.474
9	Jawa Barat	17.520.858	124.035.052	295.535.428	33.060.835	6.333.273.480	195.090.239	11.106.037	349.338.089	98.186.229	643.563.439
10	Jawa Tengah	13.978.641	240.364.457	94.655.109	230.151.261	1.410.162.926	400.861.887	142.528.825	274.952.314	67.368.838	1.954.712.343
11	Jawa Timur	150.396.555	481.968.114	282.623.672	617.519.354	2.028.866.721	119.175.221	433.649.977	1.208.480.416	35.495.971	1.556.375.031
12	Kalimantan Barat	0	36.620.879	543.686.990	41.282.287	2.481.058	165.606.859	49.186.437	406.397.605	0	1.645.751.730
13	Kalimantan Selatan	0	643.904.801	381.049.511	47.591.092	39.433.886	1.259.198.464	21.968	53.036.318	157.465	2.591.191
14	Kalimantan Tengah	0	76.552.454	55.559.789	0	62.942.614	231.343.003	0	7.511.760	0	426.887.077
15	Kalimantan Timur	132.285.359	167.503.260	26.277.052	34.728.094	11.150.976	7.217.070	2.198.602	29.479.929	112.051.604	645.369.918
16	Kalimantan Utara	2.024.032	107.664.449	0	247.120	0	44.922.214	0	311	0	48.440.349
17	Kepulauan Bangka Belitung	210.964.388	536.560.122	281.480.106	74.023	251.019.756	378.406.600	22.396.684	1.120.536.612	0	216.253.672
18	Kepulauan Riau	1.442.282	130.584.372	10.103.958	19.839.408	50.110.008	310.754.963	31.534.191	612.876.050	0	918.846.843
19	Lampung	0	997.704.838	81.147.955	367.908	1.716.909	86.078.325	51.073.819	362.560.543	237.475.000	397.249.327
20	Maluku	2.893.441.721	20.710.973	488.024.235	1.224.348.403	168.792.534	3.622.938.186	258.919.660	458.791.182	1.802.524.965	352.554.803
21	Maluku Utara	988.606.771	279.263.319	8.611.993	184.961.422	0	835.955	21.647.495	183.974.969	986.719.055	0
22	Nusa Tenggara Barat	144.208.733	138.019.672	277.242.478	142.714.317	112.777.816	41.456.989	111.962.521	210.909.208	72.762.936	91.835.962
23	Nusa Tenggara Timur	207.015.255	470.948.451	54.433.098	88.668.747	26.023.389	75.389.592	1.464.993	96.276.052	67.702.187	35.181
24	Papua	1.058.914.383	553.810.167	20.328.633	1.100.038	5.897.301	339.215.012	4.003.333	1.214.800.189	2.227.912.305	43.547.708
25	Papua Barat	292.910.957	3.146.580.111	525.294.635	150.447.901	0	554.675.510	298.163.040	9.130.261	440.853.978	411.839.368
26	Riau	0	1.249.773.138	0	0	1.020.396	120.896.289	147.976.986	207.827	0	418.945.371
27	Sulawesi Barat	224.176.106	536.096.421	2.849.894	4.673.606	0	0	19.676	8.988.009	60.862.427	0
28	Sulawesi Selatan	2.479.299	911.592.132	425.112.027	341.881.559	1.132.059.852	122.785.103	832.252.573	691.975	211.572.145	916.554.187
29	Sulawesi Tengah	792.346.709	399.011.934	235.547.272	334.265.033	0	6.825.500	67.822.375	16.665.364	284.437.577	9.143.006
30	Sulawesi Tenggara	433.201.826	496.450.469	466.782.817	932.279.652	200.651.590	65.225	573.598.798	153.763.189	344.308.627	26.831.037
31	Sulawesi Utara	765.311.486	3.572.315.006	391.479.028	567.675.317	0	37.196.288	203.553.041	47.182.706	239.156.734	134.967.144
32	Sumatera Barat	5.471.138	61.907.570	662.067.181	12.412.840	0	116.188.341	110.217.894	1.467.330.223	301.464.732	1.640.920.019
33	Sumatera Selatan	0	3.265.675	17.105.578	0	42.924.964	0	3.579.655	0	0	35.085.613
34	Sumatera Utara	222.852.571	771.978.213	1.931.498.472	378.227.929	548.164.935	495.640.285	1.912.748.467	380.854.423	51.797.909	5.550.541.000
Nasional		10.559.630.200	18.514.383.753	9.557.829.266	5.845.458.764	12.909.691.409	9.452.300.082	5.509.763.827	10.318.320.204	10.593.254.422	22.009.626.415

Sumber: Satu Data Kelautan dan Perikanan, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa nilai produksi pada 10 komoditas utama perikanan tangkap tidak jauh berbeda dari volumenya. Volume terbesar pada pada komoditas tongkol dan terkecil pada komoditas tuna. Jumlah untuk komoditas tongkol adalah sebesar 612.876.050 dan untuk komoditas tuna berjumlah 0 (nol).

D. Volume Produksi Unit Pengolahan Ikan
Skala Mikro Kecil vs Skala Menengah Besar
Menurut Provinsi tahun 2017

a). Volume Produksi Unit Pengolahan Ikan
Skala Mikro Kecil

No	Provinsi	Volume Produksi (Ton)
1	Kepulauan Riau	64978

(sumber: Satu Data Kelautan dan Perikanan,2018)

b). Volume Produksi Unit Pengolahan Ikan
Skala Menengah Besar

No	Provinsi	Volume Produksi (Ton)
1	Kepulauan Riau	12649

(sumber: Satu Data Kelautan dan Perikanan,2018)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa volume produksi unit pengolahan ikan skala mikro kecil pada provinsi kepri lebih besar jika di dibandingkan dengan volume produksi unit pengolahan ikan skala menengah besar. Adapun volume produksi unit pengolahan ikan skala mikro kecil Provinsi Kepri berjumlah 64.978 (Ton), sedangkan volume produksi unit pengolahan ikan skala menengah besar Provinsi Kperi berjumlah 12649 (Ton). Hal ini menunjukkan bahwa, unti pengolahan ikan skala kecil lebih banyak dilakukan oleh masyarakat Kepri, baik secara professional maupun secara tradisonal. Hal ini tentunya mempengaruhi volume dan nilai produksi perikanan tankap di laut Kepri.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis deskriptif yang peneliti telah paparkan pada hasil dan pembahasan, maka dapat diketahui bahwa volume dan nilai produksi perikanan di laut provinsi Kepri tidak relatif besar. Hal ini bisa dilihat melalui kecilnya angka volume dan nilai produksi perikanan tangkap pada Provinsi Kepri. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia serta melihat kondisi geografis Provinsi Kepri yang memiliki laut yang sangat luas, maka jumlah tersebut masih

tergolong kecil. Hal ini cukup memperhatikan, mengingat luas wilayah perairan provinsi Kepri yang cukup luas yakni dengan luas daratan 8.201.72 km² dan luas perairan 69.155.01km² (BPS, 2017). Hal tersebut bisa saja makin buruk dengan adanya permasalahan *spill oil* yang kerap terjadi dan belum memiliki solusi yang tegas baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Volume dan nilai produksi perikanan dilaut Kepri yang tergolong rendah, menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman oleh pelaku pencemaran atas dampak yang dihasilkan, yakni merugikan tidak hanya ekosistem laut tetapi juga pendapatan dari nelayan hingga rantai perekonomian lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2017). Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016. Retrieved April 21, 2020, from <https://www.bps.go.id/> website: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html>
- Helmy, Q. (2015). Bioremediation of aged petroleum oil contaminated soil: from laboratory scale to full scale aplication. *Procedia Chemistry.*, 326–333.
- HK, K. (2015). The impact of oil contamination on soil ecosystem. *Biological and Chemical Research.*, 133–139.
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunanana Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1–2, 92–101. Retrieved from <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/platax>
- Latief, M. (2018). Implementasi MARPOL (Marine Polution) dan SOLAS (Safety of Life at Sea) Terhadap Penerapan Penataan Limbah di Kapal. *Jurnal Venus*, 06(no 12), 1–19.
- MARPOL, Komitmen Industri Pelayaran Melindungi Laut, Darat, Udara. (2019). Retrieved February 20, 2020, from Jurnal Maritim website: <https://jurnalmaritim.com/marpol-komitmen-industri-pelayaran-melindungi-laut-darat-dan-udara/>
- Mediacenter. (2019). Laut Belakangpadang

- Tercemar Tumpahan Minyak. Retrieved February 12, 2020, from Media Center Kota Batam website: <https://mediacenter.batam.go.id/2019/11/18/laut-belakangpadang-tercemar-tumpahan-minyak/>
- Pardosi, A. . (2016). Potensi dan Prospek Indonesia Menuju Poros Maritim. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2016, 4 (1) 017-026 ISSN 2477-2623. Universitas Mulawarman.
- Ramadhan, A. (2017). Economic Valuation Approach for Calculating the Economic Impact Due to Oil Spill on Coastal and Marine. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, Vol. 12 No, 1–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v12i1.6283>
- Wahyuni, S. (2015). *Qualitative Research Method: Theory and Practice 2nd Edition* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.